



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS
JL. KOL. SUGIONO NO. 17 PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan KaruniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022 telah selesai disusun.

LKjIP disusun guna menyajikan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan Instansi.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama 1 tahun yang memuat pencapaian Kinerja program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Disamping keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas selama 1 tahun.

Kami berharap LKjIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga Allah SWT senantiasa meringankan langkah upaya dan niat baik kita dalam melaksanakan tugas.

Purwokerto, 6 Februari 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. YAYAH SETIYONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640514 198503 1 010

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang merupakan kewenangan daerah kabupaten.

GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik;
 2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
 3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Tata Kelola e-Government;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi; dan
 3. Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas.

- e. Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Sub Koordinator Statistik; dan
 3. Sub Koordinator Persandian dan Telekomunikasi.
- f. Jabatan fungsional.

Jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini terdapat jabatan fungsional pranata komputer.

PERMASALAHAN UTAMA

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas, permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas khususnya yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- **Komunikasi dan Informatika**
 - a. Ketersediaan dan penggunaan aplikasi telematika dan infrastruktur komunikasi dan informatika yang masih perlu ditingkatkan.
- **Statistik**
 - a. Pengelolaan data statistik sektoral perlu lebih dioptimalkan.
- **Persandian**
 - a. Standarnya keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika, isu strategis yang terkait adalah tentang Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi khususnya teknologi informasi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun demikian infrastruktur pendukung penerapan e-government tersebut sampai saat ini belum optimal.

Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Beberapa permasalahan teknis utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

1. Aplikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Banyumas.
- b. Belum semua layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.
- c. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah (masih digunakan secara parsial).
- d. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi telematika yang sudah ada oleh perangkat daerah.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika yang sudah ada oleh perangkat daerah.
- f. Masih kurangnya kompetensi SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2. Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Belum optimalnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan informasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang merupakan kordinator pengelola informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan perhatian secara maksimal dari OPD.
- c. Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

3. Statistik Sektoral

- a. Belum terstandarnya pengelolaan data statistik sektoral.
- b. Masih terbatasnya aplikasi untuk menampilkan data statistik.
- c. Masih minimnya pengetahuan dalam pengelolaan data statistik.
- d. OPD kurang optimal dalam penyampaian data yang dimiliki baik secara kualitas, kuantitas, maupun waktu pengumpulan.

4. Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. SDM yang menangani persandian belum tersedia.
- b. Masih terbatasnya penggunaan dan pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi antar OPD.
- c. Masih terbatasnya pengetahuan dan komitmen dalam pemanfaatan keamanan informasi TIK.
- d. Belum optimalnya fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telekomunikasi/masih adanya daerah blankspot.
- e. Aplikasi untuk melakukan tes ketahanan Sistem Informasi belum tersedia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas di Tahun 2022 di bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengukuran kinerjanya dilakukan dengan mengacu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dapat dicapai.

Di bidang statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Adapun kinerja di bidang statistik meliputi penyusunan data statistik dan metadata statistik menuju Satu Data Statistik. Data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah statistik sektoral yang diwujudkan dalam buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas setiap tahunnya. Di tahun-tahun mendatang, masih perlu ditingkatkan tata kelola statistik sektoral ini, mulai dari penerapan peraturan satu data, metadata statistik, dan peningkatan kuantitas serta kualitas data sektoral yang disusun.

Sedangkan bidang persandian melaksanakan kinerja keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kinerja ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah yang memerlukan pengamanan data pemerintah. Di bidang persandian ini perlu ditingkatkan kualitas OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi dan standardisasi keamanan informasi baik aplikasi, data, maupun infrastruktur pendukungnya misalnya pusat data, jaringan, dan sumber daya manusia.

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Formulasi = Hasil indeks SPBE Tipe Perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE	3.20
2	Sasaran 1 : Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang Memanfaatkan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Formulasi = Jumlah OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah : jumlah OPD x 100% Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = Rencana pemanfaatan TIK Pekab	90%
3	Sasaran 2 : Meningkatkan Keamanan Informasi	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Formulasi = Jumlah pengamanan sistem informasi elektronik yang terselenggara dengan baik : jumlah pengamanan sistem informasi yang ada X 100% Tipe Perhitungan = non kumulatif Sumber data = Laporan Insiden	86%
4	Tujuan 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Formulasi = Hasil Pemeringkatan KIP Tipe perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Hasil Pemeringkatan KIP	96
5	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dikelola dengan Baik	Formulasi = Jumlah Data Statistik Sektoral yang dikelola : Jumlah Data Statistik Sektoral x 100% Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = Laporan Data Statistik Sektoral	100%

6	Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	Formulasi = Jumlah Jenis Informasi Publik yang dikelola : Jumlah Jenis Informasi Publik x 100% Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = Laporan Jenis Informasi Publik	100%
---	--	---	---	------

Sedangkan anggaran yang mendukung sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2 ANGGARAN YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2022**

NO	TUJUAN/ SASARAN	ANGGARAN	KET
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12.159.291.247	DBHCHT; PAD
2	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	11.980.995.247	DBHCHT; PAD
3	Meningkatkan Keamanan Informasi	178.296.000	PAD
4	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	889.585.532	PAD
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	64.192.000	PAD
6	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	825.393.532	PAD
TOTAL		13.048.876.779	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Target dan realisasi kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

TUJUAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
TUJUAN 1					
Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.20	2.60	81%	Tinggi
TUJUAN 2					
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik					
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Poin	96	90.5	94%	Sangat tinggi
RATA-RATA CAPAIAN				89,5%	Tinggi

Dalam Tabel di atas dapat dilihat ada beberapa pencapaian dan penurunan kinerja di tahun 2022. Dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2.60 dengan Predikat SPBE : Baik.
Dari data di atas, belum mampu mencapai target yang diinginkan yaitu 3.20 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2022. Hal ini karena adanya nilai yang rendah pada Domain Manajemen SPBE pada Penerapan Manajemen TIK dan pada Audit TIK.
- b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik:
Dari data di atas, nilai KIP tahun 2022 adalah 90.5 dan ini belum mampu mencapai target yang diinginkan yaitu 96 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2022, walaupun secara Predikat adalah tetap sama dengan tahun 2021 yaitu Kabupaten Informatif. Hal ini karena adanya indikator media sosial yang pencapaiannya rendah.

- c. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Sudah sesuai target untuk kedua target indikatornya.
- d. Meningkatkan Keamanan Informasi
Sudah sesuai target untuk kedua target indikatornya.
- e. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.

Dilihat dari tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah sebesar 89,5% dengan predikat kinerja Tinggi. Berdasarkan data capaian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tersebut di atas, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.2. Predikat Kinerja Tahun 2022

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat tinggi	1	50
2	Tinggi	1	50
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat rendah	-	-
JUMLAH IKU		2	100

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu

Target dan realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dan 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.10	2.73	88%	3.20	2.60	81%	Tinggi
2	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang Memanfaatkan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	80%	80%	100%	80%	80%	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatkan Keamanan Informasi	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	64%	64%	100%	86%	64%	74%	Tinggi
4	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	95	93	98%	96	90.5	94%	Sangat tinggi
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektor	Persentase Data Statistik Sektor yang Dikelola dengan Baik	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Sangat tinggi
6	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat tinggi

Dalam tabel di atas dapat dilihat ada beberapa pencapaian dan penurunan kinerja di tahun 2022. Dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2.60 dengan Predikat SPBE : Baik.
Dari data di atas, belum melampaui target yang diinginkan yaitu 3.20 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2022.
 - b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik: 90.5.
Dari data di atas, belum mampu mencapai target yang diinginkan yaitu 96 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2022.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Sudah sesuai target.
 - d. Meningkatkan keamanan informasi
Belum sesuai target karena masih adanya OPD yang belum secara optimal dilayani dan menggunakan fasilitasi keamanan informasi.
 - e. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan RPJMD

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	TARGET RPJMD	CAPAIAN RPJMD
	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.20	2.60	81%	3.30	
2	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang Memanfaatkan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	80%	80%	100%	100%	
3	Meningkatkan Keamanan Informasi	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	86%	64%	74%	100%	
4	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	96	90.5	94%	97	
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dikelola dengan Baik	100%	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	100%	100%	100%	100%	

Dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2.60 dengan Predikat SPBE : Baik
Dari data di atas, masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMD.
 - b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik: 90.5
Dari data di atas, masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMD.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.
 - d. Meningkatkan keamanan informasi
Belum sesuai target untuk target indikatornya.
 - e. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- a. Untuk Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih diperlukan upaya mengejar kecukupan nilai dan persyaratan khususnya dari indikator baru yaitu indikator penerapan manajemen.
 - b. Untuk Nilai Tingkat Keterbukaan Informasi Publik masih diperlukan upaya untuk mencapai target yang diinginkan. Strateginya adalah melakukan penguatan pada komponen nilai medsos, konsultasi dan studi komparasi terkait pengelolaan medsos.

B. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	PROSENTASE (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12.159.291.247	11.858.125.107	98%
2	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	11.980.995.247	11.682.412.388	98%
3	Meningkatkan Keamanan Informasi	178.296.000	175.712.719	99%
4	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	889.585.532	885.440.656	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	64.192.000	63.646.448	99%
6	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	825.393.532	821.794.208	100%

Tabel 3.5 Tingkat Efektivitas Anggaran Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	81%	11.858.125.107	98%
2	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1	100%	11.682.412.388	98%
3	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	74%	175.712.719	99%
4	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	1	94%	885.440.656	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1	100%	63.646.448	99%
6	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1	100%	821.794.208	100%

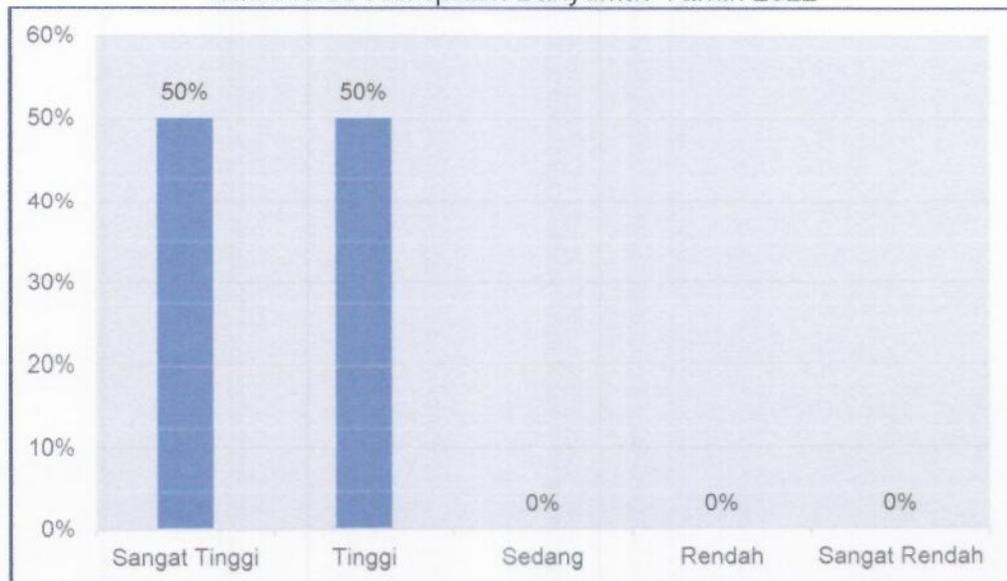
Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi anggaran tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	81%	98%	83%
2	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1	100%	98%	102%
3	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	74%	99%	75%
4	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	1	94%	100%	94%
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1	100%	99%	101%
6	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1	100%	100%	100%

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.10. Capaian Indikator Kinerja Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2022



Adapun pencapaian kinerja pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 2.60 dengan Predikat SPBE: Baik. Dari data tersebut, belum melampaui target yang diinginkan yaitu 3.20 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya indikator penilaian Domain Manajemen SPBE yang dinilai kurang optimal pada

- a. Penerapan Indikator Manajemen SPBE
- b. Penerapan Indikator Audit TIK pada Domain Manajemen SPBE

Secara lebih rinci realisasi capaian indeks SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian realisasi capaian indeks SPBE

Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00

Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,45
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

Tujuan 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Sementara tujuan kedua yaitu Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengalami penurunan poin dari tahun sebelumnya namun tetap berstatus sama yaitu Badan Publik Informatif. Nilai yang diperoleh 90.5 di tahun 2022 tidak mencapai target yaitu 96 dikarenakan adanya indikator penilaian yang lebih menekankan pada penilaian Media Sosial dan hal ini menjadi fokus penekanan untuk tahun mendatang.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan keterbukaan informasi publik

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	%	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Poin	96	90.5	94%	Badan Publik Informatif

C. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut disampaikan program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Tujuan pertama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks SPBE, memperoleh hasil yang kurang optimal dibandingkan target tahun 2022 dan capaian tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya nilai yang rendah pada Domain Manajemen SPBE pada Penerapan Manajemen TIK dan pada Audit TIK. Kegiatan kegiatan yang mendukung penilaian ini akan lebih digenjut untuk tahun mendatang. Sedangkan kegiatan lain yang pada umumnya mencapai target dan masuk dalam penilaian SPBE di tingkat pusat tetap dilaksanakan. Kegiatan dimaksud antara lain Fasilitasi Pengembangan Aplikasi, Pengembangan Ekosistem E - Government, Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government, Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pemeliharaan jaringan internet dan intranet, web hosting dan updating data website, Pengembangan data center,

NOC dan data recovery center, Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi, dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi.

Sementara tujuan kedua yaitu Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengalami penurunan poin namun secara status tetap yaitu Badan Publik Informatif. Penurunan nilai ini dikarenakan adanya indikator penilaian yang lebih menekankan pada penilaian di tata kelola Media Sosial dan hal ini menjadi fokus penekanan untuk tahun mendatang.

D. PENGHARGAAN / PRESTASI YANG DIRAIH TAHUN 2022

1. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah : Kategori Informatif Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Menyampaikan, Menyediakan dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa dari kedua tujuan strategis dengan rata-rata capaian kinerja adalah 87,5% dengan predikat **TINGGI**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan strategis ke-1, Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan rata-rata capaian 81% dengan predikat tinggi.
2. Tujuan strategis ke-2, Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan rata-rata capaian 94% dengan predikat sangat tinggi.

Capaian kinerja tujuan pertama yaitu Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah menurun menjadi 84% karena adanya nilai yang rendah pada indikator tingkat kematangan penerapan manajemen. Kegiatan kegiatan yang mendukung indikator ini akan lebih digenjot untuk tahun mendatang.

Sedangkan kinerja tujuan kedua yaitu Meningkatkan keterbukaan informasi publik mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 94%. Walaupun mengalami penurunan poin namun secara status tetap sama dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu Badan Publik Informatif. Penurunan nilai ini dikarenakan adanya indikator penilaian yang menekankan tatakelola media sosial dan hal ini menjadi fokus untuk tahun mendatang.

Hal-hal tersebut menjadi evaluasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Selain dengan lebih berkoordinasi dengan instansi terkait, tetapi juga meningkatkan inovasi dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila pada Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2022 terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2022;
2. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah : Kategori Informatif Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Menyampaikan, Menyediakan dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik